

Pembangunan yang Membungkam Perempuan dan Alam

Oleh: Fitri Sarasati M
Email: ftri.sarasati@usni.ac.id



Ilustrasi:
Suara Perempuan Suara Alam

Indonesia tengah berada dalam pusaran percepatan pembangunan yang kerap dipahami secara sempit sebagai akumulasi infrastruktur dan peningkatan investasi. Namun di balik narasi pertumbuhan tersebut, terdapat kenyataan sosial yang tak terangkat ke permukaan yaitu meningkatnya konflik ekologis di berbagai wilayah dan menguatnya ketimpangan struktural yang menghantam kelompok-kelompok paling rentan. Di pegunungan Kendeng, para perempuan petani berdiri di depan pabrik semen yang mengancam mata air yang mereka rawat turun-temurun. Di Kalimantan, perempuan Dayak kehilangan kebun pangan akibat proyek *food estate* yang menjanjikan ketahanan pangan tetapi justru merampas ruang hidup komunitas adat. Di Papua, perempuan adat berhadapan dengan ekspansi tambang dan perkebunan monokultur yang menggusur hutan tempat mereka mengelola obat-obatan alami dan nilai-nilai spiritual. Fenomena ini mencerminkan realitas pembangunan yang timpang yang tidak hanya melukai bumi tetapi juga mereduksi posisi perempuan sebagai pelaku utama dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Dalam kerangka berpikir kritis, realitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan yang menggabungkan kapitalisme, kolonialisme, dan patriarki. Vandana Shiva, seorang ilmuwan ekofeminis asal India, menjelaskan bahwa pembangunan modern bukanlah proyek netral melainkan manifestasi dari logika dominasi yang menjadikan alam sebagai objek eksloitasi dan perempuan sebagai tenaga yang tidak diakui nilainya. Dalam *Staying Alive Women Ecology and*

Development (1989), Shiva menulis bahwa alam adalah sistem hidup yang terorganisir secara mandiri dan perempuan secara historis menjadi penjaga pengetahuan ekologis tersebut. Ketika perempuan disingkirkan dari ruang pengambilan keputusan, yang terjadi adalah penghilangan terhadap satu bentuk pengetahuan yang selama ini menopang keberlanjutan kehidupan. Penyingkiran ini tidak bisa dibaca sebagai ketidaksengajaan kebijakan tetapi sebagai bagian dari kerangka dominasi yang lebih besar yang menjadikan pembangunan sebagai instrumen penguasaan dan perampasan.

Model pembangunan Indonesia yang berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam sangat kentara dalam proyek-proyek strategis nasional seperti tambang nikel di Sulawesi, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, dan proyek lumbung pangan yang disebar di Sumatra dan Papua. Studi WALHI (2023) menunjukkan bahwa lebih dari satu juta hektar hutan dan lahan produktif terancam akibat proyek-proyek ini. Kerusakan ekologis bukan hanya menghilangkan vegetasi tetapi turut menghancurkan sistem sosial yang menopang kehidupan sehari-hari terutama perempuan. Hilangnya akses terhadap air bersih, langkanya bahan pangan lokal, dan meningkatnya frekuensi bencana ekologis turut menggandakan beban domestik yang selama ini dipikul oleh perempuan desa. Namun ironi terbesar adalah mereka yang paling terdampak justru paling jarang dilibatkan dalam diskusi pembangunan. Proses-proses teknokratik yang mendominasi perencanaan pembangunan tidak memberi ruang bagi narasi pengalaman hidup apalagi narasi perempuan desa yang dianggap tidak memiliki kompetensi teknis.

Aksi perempuan petani Kendeng yang menyemen kaki mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap pendirian pabrik semen adalah penanda kuat bahwa tubuh perempuan dan tubuh bumi sama-sama menjadi medan eksplorasi. Tubuh yang selama ini bekerja untuk merawat keluarga dan komunitas, kini dipaksa menjadi simbol perlawanan karena suara mereka diabaikan. Vandana Shiva dalam *Earth Democracy Justice Sustainability and Peace* (2005) menyebut relasi ini sebagai sistem kehidupan yang saling terhubung yang coba dikendalikan oleh patriarki. Dalam relasi ini, perempuan tidak hanya berjuang untuk lingkungan tetapi juga untuk mendapatkan kembali haknya sebagai subjek politik dan ekologis. Perjuangan perempuan bukan hanya tentang identitas gender melainkan tentang hak atas kehidupan dan keberlanjutan.

Kajian Arora-Jonsson (2011) memperkuat argumen bahwa perempuan sering kali memiliki pengetahuan ekologis lokal yang krusial namun tidak masuk dalam perumusan kebijakan. Di Indonesia, Suryakusuma (2020) mengkritik pembangunan top-down yang tidak mengenali peran

perempuan desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pandangan Vandana Shiva, pengabaian terhadap kerja-kerja Perempuan seperti merawat tanah, menjaga benih lokal, dan merawat ekosistem kecil di sekitar rumah adalah bentuk invisibilitas struktural yang dihasilkan oleh model ekonomi yang bias pasar dan maskulin. Dalam *Soil Not Oil Environmental Justice in an Age of Climate Crisis* (2008), Shiva menyatakan bahwa kerja ekologis dan kerja perempuan tidak pernah tercermin dalam model ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, kedua jenis kerja inilah yang menopang kehidupan dalam arti yang paling mendasar.

PDB sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi menjadi contoh paling nyata bagaimana pembangunan meminggirkan nilai-nilai ekologis dan sosial. Indikator ini hanya menghitung total barang dan jasa yang diproduksi tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan, nilai kerja reproduktif yang tidak dibayar, serta kehancuran relasi sosial yang terjadi akibat pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan yang mengagungkan pertumbuhan PDB sering kali mengorbankan nilai kehidupan yang tidak bisa dikalkulasi secara ekonomi. Ini menjelaskan mengapa suara perempuan dan pengalaman ekologis mereka kerap dianggap tidak relevan dalam kebijakan pembangunan.

Di tengah krisis iklim global dan meningkatnya ketimpangan sosial, pembangunan harus didefinisikan ulang secara radikal. Ia tidak lagi bisa dimaknai sebagai akumulasi investasi dan infrastruktur, tetapi sebagai proses merawat kehidupan bersama. Perempuan sebagai penjaga bumi dan pewaris pengetahuan ekologis harus ditempatkan sebagai pusat pengambilan keputusan bukan semata untuk memenuhi kuota representasi tetapi karena mereka memiliki perspektif dan praktik hidup yang menawarkan alternatif atas kegagalan sistem yang ada. Menggemarkan suara Vandana Shiva berarti menggugat logika pembangunan yang mengorbankan kehidupan dan memperjuangkan masa depan yang adil secara ekologis dan setara secara sosial. Suara perempuan bukan suara pinggiran ia adalah suara masa depan yang tak boleh lagi dibungkam.

Daftar Pustaka

- Arora-Jonsson, S. (2011). “Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change.” *Global Environmental Change*, 21(2), 744–751.
- Shiva, V. (1989). *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. Zed Books.
- Shiva, V. (2005). *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. South End Press.
- Shiva, V. (2008). *Soil Not Oil: Environmental Justice in an Age of Climate Crisis*. South End Press.
- Suryakusuma, J. (2020). *Negara dan Perempuan: Pandangan Kritis atas Orde Baru*. Komunitas Bambu.
- WALHI. (2023). *Laporan Tahunan: Ancaman Ekologis dalam Proyek Strategis Nasional*.
www.walhi.or.id